

PEMBENTUKAN KABUPATEN MUARO JAMBI

1997-2000

SKRIPSI

(Diajukan Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora Pada Program Studi Ilmu Sejarah, Jurusan Sejarah Seni Dan Arkeologi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi)



ANUGRAH T.M SIAHAAN

(11A117034)

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
JURUSAN SEJARAH SENI DAN ARKEOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JAMBI**

2022

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	5
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	9
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Tinjauan Pustaka.....	9
1.6 Kerangka Konseptual.....	12
1.7 Metode Penelitian.....	15
1.8 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II POTRET KABUPATEN MUARO JAMBI.....	17
2.1 Kondisi Geografis.....	19
2.2 .Kondisi Perekonomian.....	21
2.3 Kondisi Demografis.....	22
BAB III LATAR BELAKANG SEJARAH PEMEKARAN KABUPATEN MUARO JAMBI.....	23
3.1 Sejarah.....	25
3.2 Pembentukan Kabupaten Muaro Jambi.....	27
BAB IV DAMPAK PEMEKARAN TERHADAP MASYARAKAT MUARO JAMBI.....	34
4. 1Dampak dibidang Perekonomian.....	35
4.2 Dampak Pemekaran Terhadap Sosial Budaya.....	36

BAB V PENUTUP	41
5.1 Kesimpulan.....	41
5.2 Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	44

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang berjudul **“PEMBENTUKAN KABUPATEN MUARO JAMBI ,1997-2000** Yang disusun oleh **ANUGRAH T.M SIAHAAN**

dengan NIM **I1A117034** telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar proposal.

Jambi, 01 Februari 2023

Pembimbing I

Dr. Supian,S.Ag.,M.Ag.

NIP. 197310172006041002

Jambi, 02 Januari 2023

Pembimbing II

Abdurrahman,S.Pd.,M.A.

NIP. 198601122019031009

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi yang berjudul **“PEMBENTUKAN KABUPATEN MUARO JAMBI ,1997-2000** Yang disusun oleh **ANUGRAH T.M SIAHAAN** dengan NIM **I1A117034** telah dipertahankan di depan tim penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 04 Juli 2022

Tim Penguji,

Dr. Supian, S.Ag., M.Ag. (Ketua) 1. _____

NIP. 197310172006041002

Abdurrahman, S.Pd., M.A. (Sekretaris) 2. _____

NIP. 198601122019031009

Jambi, Januari 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Sejarah

Abdurrahman, S.Pd., M.A.

NIP. 198601122019031009

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan sebelumnya untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi. Sepengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis telah diacu dalam penulisan penelitian ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila nanti dikemudian hari saya terbukti melanggar pernyataan diatas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jambi,09 Januari 2023

Anugrah TM Siahaan

MOTTO :

*REZEKI ITU GA SELALU TENTANG UANG,
PUNYA TEMAN YANG BAIK AJA ITU UDAH LEBIH DARI REZEKI.
WALAUPUN TAK SEDARAH, TERIMA KASIH UNTUK SELALU SEARAH.
PANJANG UMUR PERTEMANAN.*

- ANUGRAH T.M SIAHAAN-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa yang maha kuasa, yang senantiasa menjadi penopang dan teman terbaik penulis sepanjang hidupnya. Hanya karena kebaikan Kasih dan Berkah-Nya lah yang menuntun penulis dalam mengerjakan skripsi ini yang berjudul PEMBENTUKAN KABUPATEN MUARO JAMBI. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada bapak dan ibu dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini menuntun dan memberikan arahan serta semangat kepada saya, ilmu yang ibu bapak dosen akan selalu saya ingat. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Ayah Tercinta Perlindungan Siahaan dan Ibu Emilia Tampubolon dan saudara saya kakak Crysti Siahaan adik Imelda serta semua keluarga besar saya selalu memberikan semangat, dorongan, nasehat serta doa yang tak henti diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dan tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada teman teman saya yang selalu mendukung saya terima kasih kepada Para Toke Tuak, Dwi Gustiani, Leo Amanda, Reki Sidebang, Ilham A, Wawan A, Rezal S, Beno W.P, Ramadhan S, Charles Sitanggang, Cecep Satria dan Fauzan A. Terima kasih telah memberikan dorongan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan semoga kita dapat mencapai kesuksesan. Teriring doa semoga tuhan selalu memberkati kepada mereka. Aamin.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul. **PEMBENTUKAN KABUPATEN MUARO JAMBI** Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah Jurusan Sejarah, Seni dan Arkeologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dengan sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, do'a, bantuan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terkhusus untuk kedua orang tua dan keluarga serta guru, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk segala hal yang telah diberikan kepada penulis.

Dalam kesempatan ini pula penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc.,Ph.Dselaku Rektor Universitas Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. M. Rusdi, S.Pd., M.Sc.selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi.
3. Bapak Dr. Supian, S.Ag, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan sebagai dosen pembimbing I yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini.

4. Bapak Abdurrahman, S.Pd., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Jambi, dan sebagai dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan ide-ide dan pemikiran dalam membimbing penulisan skripsi ini hingga selesai.
5. Terima kasih pula untuk seluruh penguji sidang skripsi, Bapak/Ibu
6. Terima kasih untuk seluruh dosen Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Jambi.
7. Terima kasih untuk segenap dosen, staf, dan seluruh pegawai Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi.
8. Terima kasih kepada instansi pemerintahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muaro Jambi dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jambi yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu di halaman ini. Penulis mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua informasi yang diberikan.
9. Terima kasih penulis ucapkan kepada bapak Edy Rahman, bapak Khorudin. Selaku narasumber yang telah bersedia diwawancarai.
10. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku kepada Para Toke Tuak Dwi, Leo Amanda, Reki S, Ilham A, Wawan, Rezal, Beno, Ramadhan Charles, Cecep dan Fauzan. Terima kasih untuk seluruh teman-teman Ilmu Sejarah 2017 untuk kebersamaan selama ini. Terima kasih pula untuk sahabat-sahabat di luar Ilmu Sejarah yang telah memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Semoga kita semua bisa sukses dan tidak saling melupakan.

11. Terima kasih juga kepada teman-temanku “Basa-Basa Ni Tuhan (tongkrongan Jawo)”, yang memberikan saran dan motivasi dikala kumpul dan memancing.
12. Terima kasih penulis ucapkan kepada keluarga Besar Masyarakat Muaro Jambi atas dukungannya kepada penulis.

Penulis menyadari dalam penulisan ini terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan tulisan ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi para pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih banyak untuk semua pihak yang telah membantu penulis, semoga bantuan yang telah diberikan dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jambi, 09 Januari 2023

Penulis

ABSTRAK

Anugrah T.M Siahaan. 2022. Pembentukan Kabupaten Muaro Jambi 19972000.

Skripsi. Program Studi Ilmu Sejarah jurusan Sejarah Seni Dan Arkeologi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pembentukan Kabupaten Muaro Jambi. Kabupaten Muaro Jambi merupakan pemekaran dari Kabupaten Batanghari. Kabupaten Batanghari yang terlalu luas memiliki potensi untuk dimekarkan. Perjuangan pembentukan Kabupaten Muaro Jambi dari masa orde baru baru terwujud pasca reformasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dalam penelitian sejarah dengan beberapa tahapan yaitu, Heruistik (Pengumpulan Data), Verifikasi (Kritik Sumber), Interpretasi (Analisis Fakta Sejarah), Dan Historiografi (Penulisan Sejarah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Muaro Jambi salah satu kabupaten di provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Batang Hari, secara resmi pemerintahan kabupaten Muaro Jambi mulai dilaksanakan pada tanggal 12 oktober 1999. Pusat pemerintahan di Kota Sengeti sebagai Ibukota di kabupaten Muaro Jambi dengan pusat perkantoran di Bukit Cinto Kenang kecamatan sekernan/ Sengeti. Pembentukan Kabupaten Muaro Jambi berdampak besar kebergai sektor baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya dan pelayanan publik.

Kata Kunci: Pembentukan, Muaro Jambi, Dampak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Muaro Jambi salah satu kabupaten di provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Batang Hari, secara resmi pemerintahan kabupaten Muaro Jambi mulai dilaksanakan pada tanggal 12 oktober 1999. Pusat pemerintahan di Kota Sengeti sebagai Ibukota di kabupaten Muaro Jambi dengan pusat perkantoran di Bukit Cinto Kenang kecamatan sekernan. Aksesibilitas yang tinggi dengan adanya lintasan jalur lintas timur menghubungkan Kabupaten Muaro Jambi dengan kota-kota utama di Sumatera bagian timur dan Pulau Jawa. Posisi geografis Kabupaten Muaro Jambi yang mengelilingi Kota Jambi menjadi pilihan bagi relokasi dan limpahan kegiatan dari Kota Jambi dan memantapkan posisinya sebagai pintu gerbang Provinsi Jambi. Kedekatannya dengan Pelabuhan Kuala Tungkal dan Pelabuhan Muara sabak yang akan dihubungkan dengan jembatan Batanghari II memberikan peluang bagi pemasaran produk-produk wilayah.¹ Kedekatam yang dimaksud adalah kedekatan dari segi geografis dan politik. Secara politik wilayah wilayah di Jambi bagian Hilir pernah satu Kabupaten yakni Jambi Hilir atau Batanghari

Kabupaten Muaro Jambi merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jambi, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagai pemekaran

¹ *Kabupaten muaro jambi dalam angka 2022 (pdf)*. www.muarojambikab.bps.go.id. hlm. 8, 48, 105–106. Diakses tanggal 2 April 2022.

dari Kabupaten Batanghari. Kabupaten Muaro Jambi berasal dari sebagian Kabupaten Batang Hari yang terdiri atas wilayah.

a.Kecamatan Jambi Luar Kota;

b.Kecamatan Sakernan;

c.Kecamatan Kumpeh Ulu;

d.Kecamatan Maro Sebo;

e.Kecamatan Kumpeh; dan

f.Kecamatan Mestong.

Pada tahun 1991-2001 Batanghari yang dipimpin oleh Bupati H.M. Saman Chatib, SH, sejalan dengan reformmasi atau tuntutan otonomi dari kabupaten Batanghari.Berdasarkan UU. No. 54 tahun 1999 dimekarkan kembali menjadi 2, yakni Kabupaten Batanghari yang beribukota Muara Bulian dan Kabupaten Muaro Jambi yang beri ibukota Sengeti yang peresmian dilakukan oleh Mendagri di Jakarta bulan Oktober 1999.

Dengan dibentuknya Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Batang Hari dikurangi dengan wilayah Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Kabupaten Muaro Jambi mempunyai batas wilayah:

- A. sebelah utara dengan Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- B. sebelah Timur dengan Kecamatan Rantau Rasau dan Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- C. sebelah selatan dengan Propinsi Sumatera Selatan; dan

- D. sebelah barat dengan Kecamatan Muara Bulian dan Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Kecamatan Merlung dan Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.²

Meskipun secara administrasi dan tata kelola pemerintahan antara Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Batanghari telah dipisahkan, akan tetapi latar sejarah, kebudayaan dan adat kedua daerah bersaudara ini memiliki akar rumpun dan suku yang sama, maka untuk masalah sejarah kebudayaan dan adat Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota bersama rakyat harus memiliki pola pikir yang sama untuk membangun dan mempertahankan nilai nilai sejarah dan kebudayaan.

Dari penjelasan diatas maka dapat diatrik kesimpulan bahwa Otonomi Daerah merupakan suatu keadaan yang dimana memungkinkan suatu daerah agar dapat mengaktualisasikan segala yang dimilikinya secara optimal. Pelaksanaan dari Otonomi Daerah itu sendiri telah memasuki babak baru setelah DPR sepakata dalam mengesahkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan di berlakukannya undang-undang tentang otonomi tersebut telah memberikan sebuah kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas lagi.³

Dalam UUD NO 54 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Muaro Jambi dinyatakan bahwa alasan terjadinya pemekaran karena sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan provinsi Jambi terkhusus Kabupaten Muaro Jambi,

²Diakses dalam . www.muarojambikab.bps.go.id. tanggal 2 April 2022.

³Menurut KBBI **de-sen-tra-li-sa-si** //désentralisasi/ n1 sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah;2penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan (atau pusat kepada cabang dan sebagainya);

adanya aspirasi yang berkembang, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan melihat perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, ekonomi, social politik dan meningkatnya beban tugas serta volume bidang kerja dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di kabupaten Muaro Jambi.

Desa Muaro Jambi secara administratif berada dalam wilayah kecamatan marosebo kabupaten Muaro Jambi. Sebelum kabupatern Muaro jambi dimekarkan dari kabupaten Batanghari, desa Muaro Jambi tergabung dalam kecamatan sekernan kabupaten Batanghari. Berdasarkan arah mata angin kabupaten Muaro Jambi secara kewilayahan berbatasan dengan beberapa wilayah, Antara lain: di sebelah barat dan utara berbatasan dengan Danau Lamo, sebagai penanda perbatasan adalah candi kedaton. Di sebelah timur, desa Muaro jambi berbatasan dengan Kemingkarluar dan Muaroselat. Sementara disebelah selatan berbatasan dengan Kemingking Dalam.⁴

Pemerintah desa Muaro Jambi terdiri atas 2 dusun, Dusun Sungai Melayu dan Dusun Sungai Kelari, kedua wilayah dusun ini terdiri dari 9 Rt, Rt 1-5 dimiliki oleh dusun Sungai Melayu dan Rt 6-9 dimiliki dusun Sungai Kelari. Secara adat wilayah Muaro Jambi digambarkan dalam piagam Muaro Jambi yang berbunyi:

“Dari Muaro selat menyebrang ke tango papan

Dari Tanggo papan terus ke Buluran Bumban

⁴Mundardjito.2009. Muaro Jambi dulu sekarang dan esok. Badan Arkeologi Palembang: Palembang.

Terus ke pinang rajo Mengkuang

Berlayar menyebrang olak tahi besi

Dari sini langsung ke sungai seno (kedaton)

Langsung keliling

Langsung ke hilir

Sampai ke duren sekat

Langsung ke selat”⁵

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar di atas, untuk mempermudah dalam penelitian dan pembahasan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Gambaran Umum Kabupaten Muaro Jambi?
2. Apa Yang Melatarbelakangi Pemekaran Kabupaten Muaro Jambi?
3. Apa Saja Pengaruh Pemekaran Terhadap Perkembangan Sosial Ekonomi Di Wilayah Muaro Jambi?

⁵Mundardjito.2009. Muaro Jambi dulu sekarang dan esok. Badan Arkeologi Palembang: Palembang.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini perlu diberikan batasan kajian baik batasan spasial maupun batasan temporal. Berdasarkan dari judul yang diangkat “**Pembentukan Kabupaten Muaro Jambi 1997-2000**” maka batasan spasial yang diambil penulis ialah wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan Batanghari, Provinsi Jambi.

Batasan temporal atau waktu yang diangkat disini ialah tahun 1997-2000. Alasan penelitian ini diawali tahun 1997 karena adanya putusan dari pemerintah tentang pemekaran di setiap wilayah Indonesia. Pada tahun ini juga dianggap tahun titik dari penentuan pemekaran Muaro Jambi karena diakhir orde baru banyak tuntutan demi tuntutan nasib daerah. Batasan akhir yang diangkat disini ialah 2000 karena di tahun ini proses dari pemekaran wilayah dan dampak yang dirasakan oleh Kabupaten Muaro Jambi berdampak langsung terhadap masyarakat. Tahun ini diambil karena pasca pemekaran tahun 1999 dan pada tahun 2000 inilah genjotan pembangunan daerah oleh Kabupaten Muaro Jambi.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran umum Muaro Jambi
2. Untuk mengetahui bagaimana terbentuknya Kabupaten Muaro Jambi
3. Untuk mengetahui pengaruh pemekaran Muaro Jambi

1.5. Manfaat Penelitian

1. Dari segi akademis, dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, menambah wawasan dan pengetahuan, dan juga menjadi acuan dalam membuat sebuah kajian tentang sejarah social.

2. Dari segi praktis, diharapkan agar semakin banyak yang membahas sejarah tentang Muaro Jambi, pemerintah lebih memperhatikan dan memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah agar tidak dilupakan dan juga menjadi semangat untuk anak local menggali lagi dan menulis sejarah-sejarah tentang Muaro Jambi yang belum terungkap.

1.6 Tinjauan Pustaka

Untuk menjadi acuan dari tulisan ini, penulis telah melakukan riset ke beberapa perpustakaan dan kantor Arsip Provinsi. Sejauh ini penulis hanya mendapatkan tulisan mengenai pemekaran wilayah dan juga pemisahan suatu wilayah dari wilayah inti (Muaro Jambi dan Batanghari) untuk membentuk Daerah Tingkat I Provinsi salah satu contoh nya ialah Provinsi Jambi. Tetapi belum ada peneliti yang menulis spesifik tentang pemekana kabupaten Muaro Jambi. Akan tetapi ada beberapa tulisan yang bisa dijadikan perbandingan dan juga acuan dalam tulisan ini dan permasalahan apa saja yang akan dibahas dalam tulisan ini.

1. Buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Mundarjito yang berjudul "*Muaro Jambi dulu sekarang dan esok*". Dalam buku ini membantu penulis dalam melihat konsep apa itu Muaro jambi dilihat dari Budaya, Politik atau Bahasa istilah. Penelitian ini memiliki perbedaan dinataranya adalah tentang fokus yang dikaji. Penulis memfokukan pada pembentukan Muaro

Jambi. Sedangkan pada kajian ini hanya melihat Muaro Jambi sebagai Jendela budaya.

2. Kedua skripsi dari Wiwik Yulianingsih yang berjudul “Sejarah Kota Mojokerto (1918-1942)”, skripsi ini membahas tentang perkembangan kota Mojokerto Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sejak dibentuknya gemeente sangat tampak pada pembangunan sarana fisik. Meski pembangunan tersebut sebenarnya diperuntukkan bagi warga Eropa, namun masyarakat Indonesia juga ikut merasakan dampak positif dari pembangunan tersebut. Pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan pasar, gedung pemerintahan, perbaikan jalan dan kampung, pemandian umum dan pengadaan air bersih. Pendidikan yang dilaksanakan di Mojokerto pun masih belum begitu terencana, sekolah-sekolah resmi baru didirikan pada akhir tahun 1940. Sedangkan untuk hiburan pada waktu itu masih berupa wayang, panggung sandiwara dan bioskop, yang kemudian menimbulkan dampak sosial dari diberlakukannya desentralisasi di Mojokerto menimbulkan berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Mulai dari pencurian, pembunuhan, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh gemeente.
3. Ketiga skripsi dari Vera Vidiana Rika yang berjudul “Sejarah Kota Lubuksikaping Masa otonomi Daerah (2000-2015)”, skripsi ini membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan fisik kota pada masa otonomi daerah. Kota Lubuksikaping setelah adanya Undang-undang otonomi daerah lebih menunjukkan eksistensinya sebagai Ibukota Kabupaten, setelah Kabupaten Pasaman terbagi dua pada tahun 2002 menjadi

Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, Kota Lubuksikaping yang merupakan ibukota Kabupaten Pasaman semakin maju baik itu dalam perubahan fisik kota, adanya sarana-sarana kota. semakin ditambah adanya sarana pendidikan, perkantoran, pasar dan transportasi. Hal ini diiringin dengan perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

4. Karya ke empat adalah Jurnal yang ditulis oleh Erdianto yang berjudul “Perkembangan Kelembagaan Dari Negeri Dan Marga Menjadi Desa Di kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi” Dalam jurnal ini membahas tentang sejarah perkembangan dari mulai marga hingga menjadi desa selain itu juga jurnal ini membahas tentang hukum dan peraturan daerah otonomi terkecil di Inidonesia

Kesamaan penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tema pokok yaitu mengenai Pemekaran suatu wilayah terutama di Muaro Jambi yang saat itu dijadikan sebagai pemerintahan dibawah Kabupaten, kemudian pembahasan mengenai Sistem Pemerintahan serta terbentuknya sebuah Kabupaten. Akan tetapi terdapat Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian diatas adalah dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada masa sebelum terjadinya pemekaran dan sudah terjadinya pemekaran.

1.7 Landasan Teori

Terjadinya dinamika perubahan dalam birokrasi Pemerintahan tentu memberi dampak perubahan bagi masyarakat baik itu dari segi Sosial, Ekonomi dan Politik sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Perubahan Sosial sebagai landasan teorinya. Perubahan Sosial merupakan fenomena

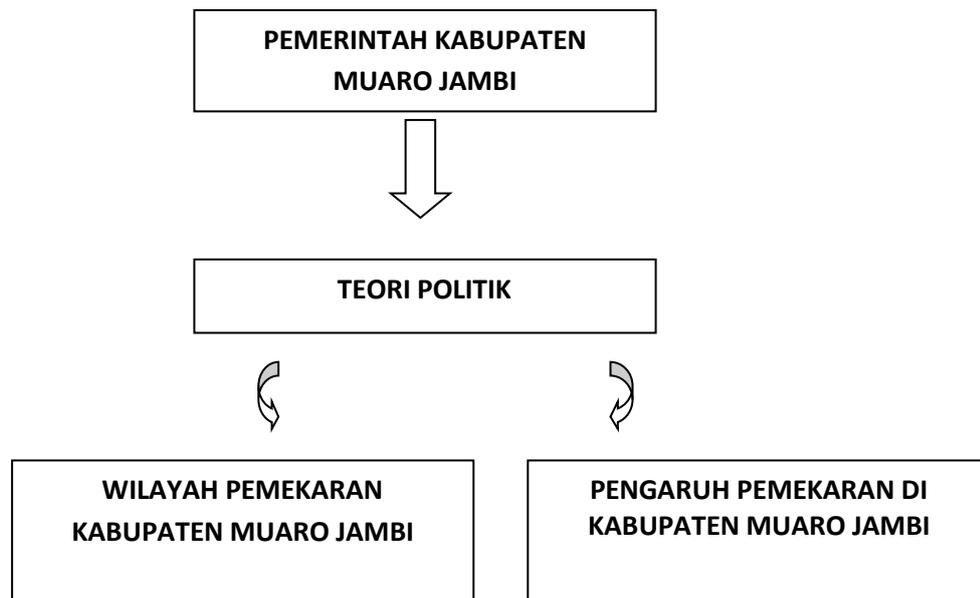
kehidupan sosial yang tidak bisa dihindari oleh setiap individu maupun kelompok masyarakat. Terjadinya perubahan sosial merupakan gejala wajar yang muncul sebagai suatu proses perubahan bentuk yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat. Proses tersebut berlangsung sepanjang sejarah hidup manusia, baik itu dalam lingkup lokal maupun global. Perubahan sosial tersebut dapat terjadi karena pada dasarnya masyarakat itu tidak bersifat statis melainkan dinamis dan heterogen.⁶Perubahan sosial juga dapat terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, kebudayaan, dan perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis.⁷

Menurut Selo Soemardjan perubahan sosial adalah yang meliputi segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.⁸Dengan demikian yang terjadi dalam Kewedanaan Jambi Luar Kota sejak tahun 1963 Kewedanaan Jambi Luar Kota berubah sttaus menjadi Kecamatan. Sehingga ditariklah kerangka berpikir sebagai berikut:

⁶ Syaifudin Jurdi, *Awal Mula Sosiologi Modren: Kerangka Epistemologi, Metodologi, dan Perubahan Sosial Perspektif Ibn Khaldun* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012), hlm. 78.

⁷ Agus Salim, *Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2020) hlm.20

⁸ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial Perubahan Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 4.



1.8 Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai cara, jalan, untuk petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. Sedangkan penelitian berarti penyelidikan yang seksama dan teliti terhadap suatu objek untuk menemukan fakta-fakta guna menghasilkan produk baru, memecahkan suatu masalah, atau untuk menyokong dan menolak suatu teori. Metode penelitian yang dimaksud adalah mengumpulkan, menguji, dan menganalisis sumber-sumber yang tersedia.⁹

Dalam melakukan pengumpulan sumber ini menggunakan metode sejarah yang mempunyai kaidah-kaidah tertentu dan pada prinsipnya penelitian adalah suatu proses yang berbentuk siklus bersusun berkesinambungan. Penelitian dimulai dari hasrat keinginan atau permasalahan, kemudian diteruskan dengan penelaan landasan teoritis dalam kepustakaan untuk mendapat jawaban sementara (hipotesis), kemudian dirancang dan dilakukan pengumpulan data (fakta) untuk

⁹ Helius Syamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 89.

menguji hipotesis melalui analisis data, sehingga diperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan. Metode penelitian sejarah adalah metode atau cara yang digunakan sebagai pedoman melakukan penelitian peristiwa sejarah dan permasalahannya¹⁰

Penulisan sebuah rangkaian peristiwa sejarah yang bersifat sistematis dan objektif maka perlu diperhatikan empat langkah utama dalam kegiatannya. Keempat langkah tersebut ialah pertama usaha mencari, mengumpulkan jejak atau sejarah masa lampau, kedua usaha untuk meneliti jejak sejarah masa lampau secara kritis, ketiga menginterpretasikan hubungan fakta satu dengan yang lain yang mewujudkan peristiwa tertentu, langkah keempat menyampaikan hasil rekonstruksi masa lalu melalui penulisan sejarah.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah. Metode sejarah merupakan tahapan - tahapan dalam penulisan skripsi yang terdiri dari empat tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.¹¹

1. Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani (*heurisein*) yang mempunyai arti menemukan, maka dari itu heuristik tidak memiliki peraturan-peraturan umum, jadi heuristik secara sederhana merupakan tahap proses menemukan, menangani dan pengumpulan sumber-sumber sejarah yang diperlukan dalam kegiatan penelitian, menurut Lucey, heuristik ialah kesaksian dalam informasi yang perlu dilakukan untuk kegiatan penelitian.¹²

¹⁰ Kuntowijoyo, *Pegantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Betung Budaya, 1995)

¹¹ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007. Hlm 68

¹² Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), Hal. 28

Heuristik adalah usaha menemukan sumber-sumber sejarah yang nantinya dapat dipercaya dan mampu menjelaskan persoalan-persoalan penting yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian sejarah.¹³

pada tahapan ini penulis mencari dan mengumpulkan sumber sumber yang relevan dengan kajian penelitian ini. Pertama, penulis melakukan pengamatan dan pencatatan serta sistematik dari fenomena-fenomena yang akan diselidiki. Kedua, penulis juga mencari sumber-sumber tertulis yang terdapat di perpustakaan baik itu di perpustakaan Prodi Ilmu Sejarah Universitas Jambi, perpustakaan Universitas Jambi, Perpustakaan Wilayah Jambi, maupun Perpustakaan Umum Kota Jambi, serta Kantor Kearsipan yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini. Ketiga, penulis melakukan wawancara terhadap subjek yang akan diteliti yang berkaitan dengan penelitian seperti melakukan wawancara terhadap tokoh saksi sejarah pada masa Kewedanaan, tokoh masyarakat, tokoh lembaga adat, dan tokoh pemerintahan Kabupaten Muara Jambi. Beberapa sumber yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu: sumber primer dan sumber sekunder.

1. Kritik Sumber

Setelah mendapatkan sumber yang cukup, selanjutnya penulis mengawalinya dengan membaca secara cermat sumber sejarah berkaitan dengan masalah yang dibahas kemudian dilakukan untuk proses pengujian kebenaran data dalam berbagai kategori yang telah terkumpul untuk memperoleh keabsahan sumber. Keabsahan sumber penulis yang dimaksud adalah sudah teruji keasliannya (otentitas) dilakukan melalui kritik intern dan kritik ekstern. Kritik interen merupakan penyelidikan

¹³ Sartono Kartodirdjo. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016). Hlm. 35.

fakta-fakta dengan melakukan pengujian terhadap dokumen. Kritik intern bertujuan untuk mengungkapkan apakah isi sumber yang dipergunakan dapat dipercaya atau tidak, dengan cara membandingkannya dengan sumber yang lain, kemudian dengan cara menganalisa kebenaran terhadap informasi atau sumber agar mendapat jawaban apakah sumber informasi ini relevan dengan penelitian atau tidak. Sedangkan kritik ekstern dilakukan dengan cara memperhatikan aspek fisik dan menganalisis kebenaran, seperti apakah sumber itu asli atau palsu masih lengkap atau tidak yang ejaannya, bagaimana gaya tulisannya, kertasnya, tintanya dan semua penampilan luarnya untuk mengetahui autensitasnya.

Kritik sumber sangat diperlukan dalam penulisan sejarah karena semakin kritis dalam menilai suatu sumber sejarah, maka semakin otentik penelitian sejarah tersebut.

2. Interpretasi

Langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi atau pemberian kesan, pendapat serta pandangan teoritis terhadap suatu tafsiran. Interpretasi terdiri atas analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan, dalam suatu sumber sejarah terkandung beberapa kemungkinan. Analisis dilakukan untuk menentukan fakta dari data yang diperoleh. Sedangkan sintesis berarti menyatukan, dari data-data yang terkumpul diambil suatu kesatuan untuk memperjelas maksud atau isi dari tulisan tersebut yang

telah disaring dalam tahapan verifikasi, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

Proses penyusunan, merangkai antara satu fakta sejarah dengan fakta sejarah yang lain sehingga dapat menjadi satu-kesatuan yang dapat dimengerti dan bermakna. Tujuannya agar data yang ada dapat mengungkapkan permasalahan yang ada, sehingga diperoleh pemecahannya. Dalam proses interpretasi tidak semua fakta dapat dimasukkan, tetapi harus dipilih mana yang lebih relevan dengan gambaran penelitian yang diambil sehingga lebih jelas untuk mendiskripsikan topik yang dibahas.¹⁴

Apabila penulis tidak mendapat data yang lebih valid, maka sumber yang telah diuji kebenaran dan keotentikannya itu, penulis jadikan kesimpulan akhir, hasil dari kesimpulan tersebut yang telah dianalisa sesuai dengan rumusan masalah dan ruang lingkup penelitian ini. Masuk dalam tahap berikutnya yaitu tahapan penulisan skripsi.

3. Historiografi

Historiografi dapat diartikan sebagai penghasil karya atau suatu proses penulisan sejarah. Karya tersebut dapat berupa buku sejarah, artikel, skripsi, tesis maupun karya-karya tulisan sejarah lainnya yang hasil akhirnya dapat dipertanggung jawab secara kejadiannya, sehingga suatu karya sejarah akan bersifat obyektif.

Historiografi telah melewati beberapa proses penyaringan hingga menjadi kesimpulan akhir yang relevan, kemudian fakta tersebut ditulis dan disajikan secara kronologis dan sistematis dalam bentuk penulisan. Penulisan ini terdiri dari tiga pembahasan pokok yaitu: pendahuluan,

¹⁴ Kuntowijoyo, "*Pengantar Ilmu Sejarah*", (Yogyakarta:Betung Budaya, 1995). Hlm. 101.

pembahasan, dan penutup yang dibagi dalam bab-bab sesuai dengan sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini menguraikan 1.1 Latar Belakang Masalah, 1.2 Rumusan Masalah, 1.3 Ruang Lingkup, 1.4 Manfaat dan Tujuan, 1.5 Tinjauan Pustaka, 1.6 Kerangka Konseptual, 1.7 Metode Penelitian dan 1.8 Sistematika Penulisan

BAB II POTRET KABUPATEN MUARO JAMBI

Dalam bab ini penulis akan menguraikan Gamabarankabupaten Muaro jambi seperti 2.1 Geografis, 2.3 Demografis, 2.4 Keadaan Sosial Budaya

BAB III LATAR BELAKANG SEJARAH PEMEKARAN KABUPATEN MUARO JAMBI

Dalam Bab ini akan membahas lebih Lanjut 3.1 Sejarah Muao Jambi dan 3.2 Pembentukan Kabupaten Muaro Jambi.

BAB IV DAMPAK DAN HASIL AKHIR DARI PEMEKARAN TERHADAP MASYARAKAT MUARO JAMBI

Dalam bab ini penulis akan mebahas mengenai perkembangan Muaro jambi pasca pemekaran yang meliputi 4.2 Perekonomian, 4.2 Sosial Budaya, 4.3 Pariwisata dan Kesehatan

BAB V PENUTUP

Dalam bab penutup berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta kritik dan saran berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

GAMBARAN KABUPATEN MUARO JAMBI

2.1 Kondisi Geografis Kabupaten Muaro Jambi

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Batang Hari, secara resmi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1999. Pusat Pemerintahan di Kota Sengeti sebagai ibu Kota Kabupaten Muaro Jambi dengan Pusat Perkantoran di Bukit Baling Kecamatan Sekernan. Kabupaten Muaro Jambi memiliki letak geografis wilayah yang cukup strategis berada di hinterland Kota Jambi, hal ini memberikan keuntungan bagi Kabupaten Muaro Jambi karena Kabupaten ini memiliki peluang yang cukup besar sebagai daerah pemasok kebutuhan kota Jambi, seperti pemasaran untuk hasil pertanian, perikanan, industri dan jasa..

Luas wilayah Kabupaten Muaro Jambi \pm 5.246 KM² , secara administrasi mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Sumatera Selatan.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Secara Geografis Kabupaten Muaro Jambi terletak antara $1^{\circ} 51^1$ Lintang Selatan sampai dengan $2^{\circ} 01^1$ Lintang Selatan dan diantara $103^{\circ} 15^1$ Bujur Timur sampai dengan $104^{\circ} 30^1$ Bujur Timur. Kabupaten Muaro Jambi

merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut antara lain :

Tabel 2.2
Katinggian Permukaan Laut Daerah Kabupaten Muaro Jambi

0	-	10	Meter	=	11,80	%
11	-	100	Meter	=	23,70	%
101	-	300	Meter	=	4,50	%

Sumber. BPS Kabupaten Batang Hari 1999 (Yang disempuernakan Untuk Muaro Jambi)

Termasuk daerah yang beriklim tropis dengan curah hujan merata sepanjang tahun rata-rata 186 mm per hari dengan Intensitas hujan rata-rata 16 hari hujan. Temperatur rata-rata 32 C dengan variasi Temperatur antara musim hujan dengan kemarau relatif kecil. Secara administratif Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan, 150 Desa dan 5 Kelurahan, Jumlah Desa / Kelurahan pada masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Jumlah Desa/ Kelurahan menurut Kecamatan Tahun 2000

No.	Kecamatan	Jumlah	
		Desa	Kelurahan
1.	Jambi Luar Kota	19	1
2.	Mestong	14	1
3.	Sekernan	15	1
4.	Maro Sebo	11	1
5.	Kumpeh	16	1
6.	Kumpeh Ulu	18	-
7.	Sungai Bahar	11	-
8.	Sungai Gelam	15	-
9.	Taman Rajo	10	-
10.	Sungai Bahar Utara	11	-
11.	Sungai Bahar Selatan	10	-
Jumlah		150	5

Sumber: Bappeda Kabupaten Batang Hari Untuk Muaro Jambi yang disempurnakan

Kabupaten Muaro Jambi memiliki suhu rata-rata 26,2°C dengan suhu tertinggi pada bulan September setinggi 32,7°C dengan kelembaban udara rata-rata 86,25% dan curah hujan rata-rata 179,3 mm serta 25 hari hujan di bulan November (Muaro Jambi dalam Angka 2012). Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson areal restorasi PT. REKI di Provinsi Jambi termasuk kedalam tipe iklim A (sangat basah) dengan curah hujan bulanan per tahun 2.305,5 mm dan hari hujan per tahun 189,9 hari hujan sehingga intensitas hujan mencapai 12,37 mm. Suhu rata-rata di area restorasi ini sebesar 26,23°C dengan kelembaban berkisar antara 28,95°C pada bulan Mei dan 24,50°C pada bulan 42 Januari. Curah hujan tertinggi terdapat pada bulan April dan bulan November sebesar 274-255,7 mm, sedangkan curah hujan terendah ada pada bulan Juli sebesar 80,5 mm.

2.2 Kondisi Perekonomian Kabupaten Muaro Jambi

, Kabupaten Muaro Jambi, memiliki komoditi tanaman pangan, tanaman palawija, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Tanaman pangan yang mereka budidayakan berupa padi untuk kebutuhan pokok pangan sehari-hari mereka. Komoditi palawija dan sayur mayur dijadikan barang komplementer dalam pemenuhan kebutuhan, tidak hanya digunakan untuk keperluan sehari-hari tetapi juga dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat, komoditi unggulannya berupa tanaman jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau, kacang panjang, pare, kesek, timun, kembang kol, terong, bayam, kangkung, singkong, tomat, dan cabe. Di bidang perkebunan Provinsi

Jambi memiliki komoditi unggulan berupa perkebunan karet dan kelapa sawit. Peternakan juga dijadikan sumber penghasilan masyarakat, produk peternakan mereka berupa sapi potong, kerbau, kambing, domba, dan babi. Di bidang perikanan masyarakat membudidayakan perikanan umum dan budidaya kolam.¹⁵

Berdasarkan sumberdaya alam yang dimiliki, Kabupaten Muaro Jambi memiliki komoditi pertambangan seperti minyak bumi, gas bumi, batubara, pasir kuarsa, dan kaolin. Industri yang ada di Kabupaten Muaro Jambi dan Batanghari merupakan industri rumah tangga yang tergolong ke dalam jenis industri skala kecil hingga skala menengah. Tempat pariwisata yang terdapat di Kabupaten Muaro Jambi dan Batanghari terdiri dari situs-situs sejarah dan objek wisata alam. Beberapa tempat wisata yang dikembangkan antara lain Situs Candi Muaro Jambi, Suku Anak Dalam, dan Pariwisata Agro (perkebunan sawit, nanas, duku, jeruk, durian).¹⁶

2.3 Kondisi Demografis Kabupaten Muaro Jambi

Kabupaten Muaro Jambi merupakan kabupaten yang memiliki pertambahan penduduk dengan laju pertumbuhan yang selalu meningkat setiap tahunnya. Data kependudukan kabupaten Muaro Jambi pada tahun 1990, 1999, 2000 menunjukkan terjadi peningkatan jumlah penduduk di seluruh kecamatan. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2000 (6,76 % per tahun), yaitu pada wilayah Kecamatan Sungai Gelam, sedangkan laju peningkatan penduduk terendah terjadi pada Kecamatan Maro Sebo (2,01 % per tahun). Data

¹⁵ . BPS Kabupaten Batang Hari 1999 (Yang disempuernakan Untuk Muaro Jambi), hlm 23

¹⁶ BPS Kabupaten Batang Hari 1999 (Yang disempuernakan Untuk Muaro Jambi), hlm 23

mengenai penambahan penduduk Kabupaten Muaro Jambi selama 10 tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.3. Penduduk di sekitar kawasan restorasi PT REKI memiliki mata pencaharian utama di bidang pertanian dan perikanan, dengan tingkat pendidikan mayoritas tamat Sekolah Dasar (SD). Saat ini tingkat perekonomian di desa sekitar kawasan restorasi sudah mengalami peningkatan dengan adanya mata pencaharian baru sebagai karyawan di perkebunan kelapa sawit, hal ini terlihat dengan adanya pembangunan-pembangunan fisik seperti tempat ibadah dan rumah masyarakat.

Tabel 2.3 Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Muaro Jambi

KECAMATAN	1990	1999	JUmlah
Kumpeh Ulu	25.891	27.498	0,6
Sungai Gelam	20.400	41.345	7,32
Kumpeh Ulu	20.705	25.385	2,06
Maro Sebo	21.391	29.773	3,36
Jambi Luar Kota	17.594	20.178	1,38
Sekernan	18.703	23.098	2,13
Mestong	28.132	41.783	4,04
Sungai Bahar	18.066	24.933	3,27

Jumlah	172.872	235.993	344.962

Sumber. BPS Kabupaten Batang Hari 1999 (Yang disempuernakan Untuk Muaro
Jambi

BAB III
LATAR BELAKANG SEJARAH PEMEKARAN
KABUPATEN MUARO JAMBI

3.1 Latar Belakang Sejarah Muaro Jambi

Muaro Jambi merupakan sebuah Kabupaten di Provinsi Jambi. Istilah Muaro Jambi diambil dari sebuah desa sebagai kawasan cagar budaya terbesar di Asia Tenggara yakni Candi Muaro Jambi. Yang merupakan warisan budaya benda yang ada di Provinsi Jambi. Sejak abad ke 7 Masehi Candi Muara Jambi telah menjadi pusat pendidikan agama Buddha. Sebenarnya cerita ini merupakan sejarah Melayu Kuno. Berdasarkan catatan Biksu It Sing abad ke 7 Masehi, ribuan siswa sudah belajar tata bahasa sanskereta. Ini jadi komplek pendidikan dari biksu Tibet, Tiongkok dan India. Biksu-biksu yang sudah mendapatkan ilmu dari Muara Jambi menyebarkan ilmunya ke negaranya. Peradaban Candi Muara Jambi mulai terhapus karena musibah banjir bandang yang terjadi pada akhir abad ke 15 Masehi. Setelah bencana ini, datang lagi wabah penyakit kolera yang menyerang.¹⁷

Sejak abad ke 7 Masehi Candi Muara Jambi telah menjadi pusat pendidikan agama Buddha. Sebenarnya cerita ini merupakan sejarah Melayu Kuno. Berdasarkan catatan Biksu It Sing abad ke 7 Masehi, ribuan siswa sudah belajar tata bahasa sanskereta. Ini jadi komplek pendidikan dari biksu Tibet, Tiongkok dan India. Biksu-biksu yang sudah

¹⁷ Wawancara: Mochtar Hadi perangkat desa dan Sejarahwan Desa Muara Jambi tentang sejarah Candi Muara Jambi, tanggal 9 Oktober 2022, jam 14.30 WIB.

mendapatkan ilmu dari Muara Jambi menyebarkan ilmunya ke negaranya. Peradaban Candi Muara Jambi mulai terhapus karena musibah banjir bandang yang terjadi pada akhir abad ke 15 Masehi. Setelah bencana ini, datang lagi wabah penyakit kolera yang menyerang masyarakat setempat termasuk biksu. Akibat dua bencana ini membuat generasi masyarakat saat itu terputus. Mulai awal abad ke 16 Masehi, masyarakat melayu generasi berbeda menjadi penghuni area yang saat ini menjangkau tujuh desa sekitar kawasan Candi Muara Jambi.¹⁸

Dalam hal ini terdapat keunikan yang dimiliki kawasan Candi Muara Jambi, keunikan candi tersebut adalah Candi Muara Jambi yang merupakan peninggalan mayoritas agama Buddha Mahayana Tantrayana sekarang diduduki oleh masyarakat melayu mayoritas agama Islam. Sejarah ini membuat masyarakat menjadi toleransi antara satu sama lain. Misalnya terjadi peringatan hari besar agama Buddha yang dilaksanakan di Candi Muara Jambi, maka masyarakat sekitar khususnya masyarakat Desa Muara Jambi menyediakan tempat dan menjadi panitia hari besar tersebut.¹⁹

Situs kawasan Candi Muara Jambi yang berada di ketinggian 14 meter diatas permukaan laut dan terletak di dataran yang merupakan daerah tanggul alam dari sungai Batanghari. Luas kawasan Candi Muara Jambi berdasarkan satuan ruang interaksi lingkungan dengan keberadaan tinggalan budaya masa lalu, berupa tinggalan kepurbakalaan dan tinggalan

¹⁸ Wawancara: Mochtar Hadi perangkat desa dan Sejarahwan Desa Muara Jambi tentang sejarah Candi Muara Jambi, tanggal 9 Oktober 2022, jam 14.30 WIB.

¹⁹ Wawancara: Mochtar Hadi perangkat desa dan Sejarahwan Desa Muara Jambi tentang sejarah Candi Muara Jambi, tanggal 9 Oktober 2022, jam 14.30 WIB.

masa sekarang pemukiman tradisional masyarakat Melayu Jambi adalah 3.118, 46 hektar. Luasan dan delineasi kawasan berdasarkan sumber utama Badan Pelestarian Benda Cagar Budaya serta Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi dan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Tinggalan cagar budaya masa lalu terdiri dari 14 bangunan candi, 75 menapo (reruntuhan candi), 17 kanal/sungai kuno, 9 kolam, 6 danau dan 1 bukit. Tinggalan cagar budaya masyarakat melayu yang masih berlangsung dan lestari berupa Pemukiman Tradisional Desa Muara Jambi dan Danau Lamo berupa rumah- rumah panggung bergaya melayu.²⁰

3.2 Pembentukan Kabupaten Muaro Jambi

Pada akhir tahun 1990 Indonesia mengalami perubahan sosial politik yang berujung kepada pilihan melaksanakan desentralisasi sebagai salah satu modal utama pembangunan Indonesia. Hal ini ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Otonomi daerah itu sendiri salah satunya bermuara kepada keinginan daerah untuk memekarkan diri yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah.

Tujuan dilakukannya pemekaran daerah adalah untuk membuka peluangpeluang baru bagi upaya pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan intensitas pembangunan guna mensejahterakan masyarakat. Pemekaran daerah

²⁰ Wawancara: Abdul Havis sebagai perangkat desa dan Sejarahwan Desa Muara Jambi tentang kawasan Candi Muara Jambi, tanggal 11 oktober 2022, jam 14.30 WIB.

juga ditujukan untuk memacu terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan membawa dampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, memperpendek jalur birokrasi, memperpendek rentang kendali, juga memberikan kemungkinan terbukanya isolasi-isolasi daerah yang terpencil. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, daerah-daerah yang terbangun hanya daerah yang berdekatan dengan ibu kota pemerintahan daerah. Pemekaran daerah diharapkan akan mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Pemekaran memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang. Alasan lainnya bahwa pemekaran akan mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil serta diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan.

Secara administratif pemekaran ialah persetujuan dari DPRD, bupati/walikota dan gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri, sementara syarat teknis antara lain ialah kemampuan ekonomi, sosial, budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan dan keamanan. Sedangkan persyaratan kewilayahan antara lain adalah 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kabupaten/kota, dan minimal 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi, serta didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa tujuan pemekaran daerah adalah untuk melancarkan pembangunan yang tersebar diseluruh wilayah dan membina kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Muaro Jambi merupakan wilayah Jambi bagian Hilir yang dari Kemerdekaan Indonesia dibawah Kabupaten Batanghari. Kabupaten Batang Hari memekarkan Muaro Jambi merupakan pemekaran pada fase ke dua yang mana fase pertama pasca pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung di tahun 1965. Salah satu dampak terjadinya pemekaran provinsi Sumatera Tengah yang mana Sumatera Tengah dijadikan menjadi tiga provinsi. Terbentuknya Propinsi Jambi yang semula merupakan bagian dari Sumatera Tengah pasca pemekaran tersebut dilakukan juga pemekaran Kabupaten. Adapun Kabupaten yang melakukan pemekaran salah satunya Batanghari Kabupaten Batanghari dipecah menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Kotapraja Jambi
2. Kabupaten Batanghari dengan ibukota di Kenali Asam
3. Kabupaten Tanjung Jabung dengan ibukota di Kuala Tungkal.²¹

Muaro Jambi berstatus sebagai wilayah dibawah Kabupaten Batang hari yang berpusat di Kenali Asam. Kabupaten Batang Hari secara resmi dipindahkan ke Muara Bulian pada tanggal 21 Juli 1979. Pemindehan ibukota dari Kenali Asam ke muara Bulian diresmikan oleh Amir Mahmud yang pada saat itu menjabat sebagai menteri dalam negeri Republik Indonesia. Pemindehan Ibukota Batang Hari ke Muara Bulian penuh pertimbangan. Pemerintahan Kabupaten Batang Hari mencalonkan tiga daerah yang bakal menjadi Ibukota Batang Hari diantaranya:

²¹ Elza. 2021. Skripsi. Sejarah Pelabuhan Dagang Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung 1965-1995. Program Studi Ilmu Sejarah Jurusan Sejarah, Seni Dan Arkeologi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi.

1. Pijoan (Yang merupakan bekas ibu kota Kewedanaan Jambi Luar Kota / Jaluko)
2. Muara Tembesi, Muara Tembesi masuk katagori yang di perhitungkan pada saat itu hal ini dikarenakan Muara Tembesi merupakan Ex Ibukota Kewedanaan Muara Tembesi yang wilayahnya meliputi Kabupaten Batang Hari pada hari ini.
3. Muara Bulian, Muara Bulian masuk nominasi Ibukota dikarenakan dengan mempertimbangkan wilayahnya yang berada di tengah-tengah Kabupaten Batang Hari. Namun kelemahannya adalah Muara Bulian tidak begitu mencolok dari segi histrosisnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Batanghari dan DPRD Kabupaten Batanghari maka diantara ketiga wilayah tersebut didapatkan lah Muara Bulian sebagai Ibukota Batang Hari. Pemilihan Ibukota Batanghari dilakukan dengan penuh pertimbangan, diantaranya Kabupaten Batanghari pada masa era 1979 merupakan wilayah dua Ex Kewedanaan yakni Kewedanaan Muara Tembesi dan Kewedanaan Jambi Luar Kota. Muara Bulian sendiri merupakan kota Kecamatan yang berada di tengah-tengah Ex Ibukota Kewedanaan Jambi Luar Kota dan Muara Tembesi maka berdasarkan kesepakatan bersama Kabupaten Batanghari lebih cocok dan strategis berada diwilayah Kecamatan Maura Bulian. Kemudian disahkan oleh ketua DPRD Kabupaten Batang Hari Raden Ateng.²²

Latar belakang munculnya isu pemekaran Muaro Jambi yaitu terjadi pada tahun 1979 yang dilakukan oleh masyarakat dan tokoh masyarakat dilakukan

²² Ria Rizki. 2022. Skripsi. *Eksistensi Muara Bulian Sebagai Ibukota Batanghari 1979 1999*. Program Studi Sejarah Jurusan Sejarah, Seni dan Arkeologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Hlm 39-40

karena melihat masyarakat yang terisolir dikarenakan jauhnya jarak tempuh yang dilalui untuk melakukan kegiatan di ibukota kecamatan sehingga masyarakat dan tokoh masyarakat melakukan pengusulan dengan terbentuknya Kabupaten Jambi Luar Kota (Muaro Jambi) diharapkan bisa mempermudah masyarakat dalam urusan pelayanan, baik dalam urusan administratif dan kependudukan maupun dalam bentuk efisiensi rentang kendali wilayah guna efektifitas pelayanan publik, mampu pemeratakan keadilan dan mampu meningkatkan pertumbuhan pembangunan (ekonomi).²³ Dilakukan oleh Tokoh Masyarakat, Panitia Khusus, Ketua dan Anggota DPRD Batanghari (Dapil Jambi Luar Kota) dan lainnya dalam pembentukan daerah otonomi baru untuk mempermudah pelayanan masyarakat, mendekatkan pelayanan, mempercepat proses pembangunan dan menambah ruang bagi ASN yang berpotensi dan memenuhi syarat untuk memegang jabatan pada kecamatan tersebut. Pemekaran ini tidak terlepas dari kepentingan elit, resistensi pemekaran dan sebagainya.

Pada akhir orde baru 1996 muncul seorang pejabat Batanghari (Sekarang-Muaro Jambi). Z. Bakrie Saleh adalah tokoh yang menjabat saat peralihan atau transisi masa kepeimpinan. dimana pada masa transisi tersebut (1997-1999) Z. Bakrie Saleh menjabat sebagai pemkab Muaro Jambi sebelum digantikan oleh bupati muaro jambi Ahmad Ripin.

Seperti yang disahkan UUD No 22 tahun 1999, dimana muaro jambi dimekarkan dari kabupaten batang hari, setelah naiknya Ahmad ripin menjadi Bupati, Z. Bakrie Saleh menjabat sebagai asisten 1. Z. Bakrie yang mengagaskan Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi bukanlah istilah yang baru,

²³ Wawancara: Abdul Havis sebagai perangkat desa dan Sejarahwan Desa Muara Jambi tentang kawasan Candi Muara Jambi, tanggal 11 oktober 2022, jam 14.30 WIB.

karena Kabupaten Muaro Jambi adalah wilayah Ex Kewedanaan Jambi Luar Kota. Memang dikatatakan di akhir orde baru wilayah Ex Kewedanaan menuntut dan mengajukan diri untuk Menjadi Kabupaten dan menuntut desentralisasi daerah. Seperti Bangko, Tebo, Sabak dan Jambi Luar Kota. Jambi Luar kota yang merupakan bekas Kewedanaan menuntut diri melalui pemuda dan masyarakat untuk Menjadi Kabupaten sendiri dan lepas dari Batanghari.²⁴

Diakhir masa pemerintahan Suharto tuntutan otonomi daerah mulai disuarakan. Kabupaten Batang Hari yang dianggap begitu luas harus segera dimekarkan. Tuntutan Masyarakat Ex Kewedanaan Jambi Luar Kota (Muaro Jambi mulai disuarakan). Kabupaten Muaro Jambi harus menjadi Otonomi daerah di Provinsi Jambi. Pembentukan Kabupaten Muaro Jambi dapat dikatakan salah satu pembentukan Kabupaten yang berjalan mulus. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.²⁵

Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tanjung Jabung adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah.²⁶

²⁴ Wawancara. Zulkarnaen. Kepala Bidang Sejarah dan Kebudayaan . Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi. Tgl 30 November 2022. Pukul 14.00

²⁵ Ibid.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kabupaten Muaro Jambi berasal dari sebagian Kabupaten Batang Hari
Ibukota Kabupaten Muaro Jambi berkedudukan di Sengeti Menurut pasal 5
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 Kabupaten Muaro
Jambi terdiri atas wilayah :

- a. Kecamatan Jambi Luar Kota;
- b. Kecamatan Sakernan;
- c. Kecamatan Kumpeh Ulu;
- d. Kecamatan Maro Sebo;
- e. Kecamatan Kumpeh; dan
- f. Kecamatan Mestong.²⁷

Pasca terbentuknya Kabupaten Muaro Jambi Oktober 1999 dengan
dilantiknya Bupati pertama yakni H. Ahmad Ripin. Yang menjabat sampai dengan
tahun 2002. Kabupaten Muaro Jambi akhirnya terbentuknya Kabupaten yang
potensial di Provinsi Jambi.

Dalam pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 1999 Kabupaten Muaro Jambi memiliki batasan:

- a. sebelah utara dengan Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Dendang,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. sebelah Timur dengan Kecamatan Rantau Rasau dan Kecamatan Sadu,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- c. sebelah selatan dengan Propinsi Sumatera Selatan; dan d. sebelah barat
dengan Kecamatan Muara Bulian dan Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur

Hari, Kecamatan Merlung dan Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Gambar 3.1

H. Ahmad Ripin Bupati Pertama Muaro Jambi 1999-2002



Sumber. Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Muaro Jambi. 2022

Pada masa awal pembentukan H Muhamad Aripin berkedudukan sebagai PJ Bupati atau bupati sementara. PJ bupati sangat penting bagi wilayah DOB baru. pemekaran satu kabupaten/kota menjadi dua kabupaten/kota atau lebih. Pemekaran kabupaten/kota atau pembentukan DOB menggunakan dasar hukum Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabat Bupati disyaratkan pernah menduduki jabatan struktural Eselon II dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/B dan selama tiga tahun terakhir memiliki kinerja yang baik. Penjabat Bupati ditetapkan Presiden atas usul dari Gubernur dari kabupaten yang bersangkutan dan pertimbangan DPRD.

Penjabat Bupati dalam Undang-Undang yang berlaku, bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri. Masa jabatan maksimal dari seorang penjabat Bupati adalah 1 tahun.²⁸

²⁸ Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

BAB IV

DAMPAK PEMEKARAN TERHADAP MASYARAKAT MUARO

JAMBI

4.1 Dampak Pemekaran Muaro Jambi Terhadap Perekonomian

Pada tahun 1979 wacana pembentukan Kabupaten dalam wilayah Ex Kewedanaan Jambi Luar Kota (Muaro Jambi, Jaluko, dll) dimulai, dalam prosesnya terdapat kepentingan dalam penentuan daerah persiapan oleh tim penyusun pemekaran. Sekelompok masyarakat menginginkan daerah ibukota berada di Pijoan, namun melihat hal itu menambah beban masyarakat dan tokoh masyarakat karena jarak tempuh juga jauh sama seperti sebelumnya yaitu berada di Muara Bulian (ibukota Batanghari), dikarenakan pembentukan pemekaran Kabupaten ini diharapkan lebih meningkatkan pelayanan yang lebih efektif dan jarak tempuh yang lebih dekat dari sebelumnya.²⁹ Maka dari itu Sangeti dianggap lebih baik menjadi Ibukota Kabupaten Batang Hari.

Dampak yang paling utama dirasakan adalah dampak ekonomi. Landasan evaluasi pemekaran wilayah berdasarkan tujuan dari pemekaran wilayah itu sendiri. Dengan adanya pemekaran wilayah dapat terciptanya kesejahteraan masyarakat dalam batasan wilayah yang kecil. Terdapat beberapa alasan kenapa pemekaran wilayah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, yaitu:

²⁹ Wawancara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi. 3 Oktober 2022 pk1 09.34

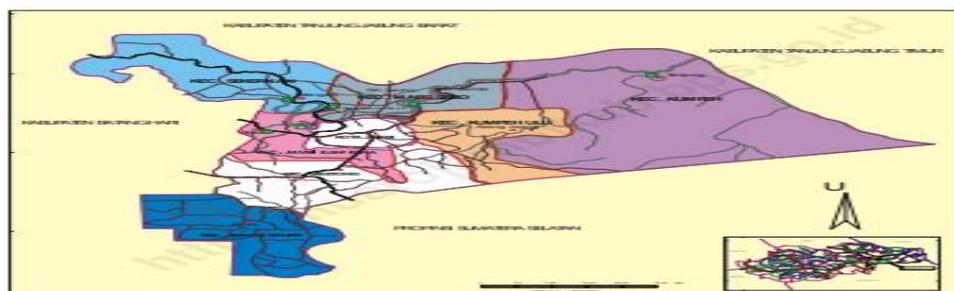
1. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur.

2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.

3. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintahan dan bagibagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan.³⁰

Pasca pemekaran penduduk Kabupaen Muaro Jambi semakin meningkat. penduduk termasuk bagian penting dalam perekonomian karena penduduk sebagai pelaku kegiatan ekonomi dan menyediakan tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja dianggap sebagai faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi karena jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif dan pertumbuhan penduduk yang lebih besar akan meningkatkan luasnya pasar domestik.³¹ Berikut ini peta Muaro Jambi pasca pemekaran:

Gambar. 4.1 Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2000



Sumber. BPS Batang Hari yang disempurnakan 1999

³⁰ Yayan Amroni. .Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2010-2016. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

³¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari-Muaro Jambi Tahun 2000

Pemekaran membuka peluang untuk terjadinya bureaucratic and political rent-seeking, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pemekaran wilayah, baik dana dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah sendiri. Di sisi lain, sebagai sebuah daerah dituntut untuk mewujudkan kemampuannya mengali potensi daerah. Hal ini bermuara kepada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada gilirannya menghasilkan suatu perekonomian daerah berbiaya tinggi.³²

Pengeluaran pemerintah Kabupaten Muaro Jambi secara garis besar dikelompokkan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pada dasarnya berunsurkan pos-pos pengeluaran lancar dan pos pengeluaran kapital. Pengeluaran rutin pada dasarnya di keluarkan untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang), angsuran dan bunga utang pemerintah, serta pengeluaran lainnya. Sedangkan pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang sifatnya menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik, yang dibedakan lagi menjadi pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek.³³

4.2 Dampak Pemekaran Muaro Jambi Terhadap Sosial Budaya

Salah satu tujuan pemekaran adalah meningkatkan dan melestarikan budaya daerah. Masyarakat Kabupaten Muara Jambi memang dikenal dengan

³² Yuliati, Emie. 2011. "Evaluasi Hasil Pemekaran : Studi Kasus Pemekaran Kabupaten". Tesis Tidak Dipublikasikan. Jakarta: Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia.

³³ Bapeda Kabupaten Muaro Jambi.

budaya melayu. Seni budaya tersebut seperti tari-tarian, teater Abdul Muluk, zikir bardah, kompangan dan lain sebagainya. Biasanya penampilan seni budaya Jambi ini ada pada saat event tertentu. Usaha ini dapat dilakukan untuk masyarakat di bidang seni ataupun yang ingin belajar seni. Contohnya pada saat festival seni budaya Candi Muara Jambi pada bulan Juni masyarakat yang memiliki bakat tarian, kompangan dll dipertunjukkan di festival tersebut, kemudian dibayar oleh panitia.³⁴

Pada saat festival seni budaya Candi Muara Jambi juga diperlihatkan arak-arakan kompangan untuk pengantin laki-laki dan wanita dengan memakai busana pengantin lengkap. Ketika datang tamu undangan juga disambut dengan tarian dan kompangan khas daerah Desa Muara Jambi. Usaha jasa seperti ini perlu dilakukan pengembangan lagi, dengan cara dibuka suatu sanggar yang mewadahi masyarakat Desa Muara Jambi yang memiliki bakat di bidang seni.³⁵ Bersamaan dengan pandangan bahwa prinsip pembentukan daerah otonom adalah untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, namun kenyataan yang ada pembentukan daerah otonom lebih banyak menimbulkan masalah-masalah yang baru, baik yang berkaitan dengan hubungan antara daerah, antar masyarakat sampai ke tahap tidak berhasil.³⁶

Kemudian dampak berikutnya pemekaran wilayah Kabupaten Muaro Jambi Adalah memajukan Kebudayaan daerah. Kabupaten Muaro Jambi Muara

³⁴ Wawancara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi. 3 Oktober 2022 pk1 09.34

³⁵ Wawancara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi. 3 Oktober 2022 pk1 09.34

³⁶ Yulianti, Emie. 2011. "Evaluasi Hasil Pemekaran : Studi Kasus Pemekaran Kabupaten". Tesis Tidak Dipublikasikan. Jakarta: Program Megister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia.

Jambi sendiri memiliki ciri khas yaitu seni budaya melayu. Keberadaan Candi Muara Jambi juga memiliki peran penting untuk pengembangan seni budaya Kaupaten Muaro Jambi. Karena setiap wisatawan yang datang biasanya akan tertarik dengan kebudayaan di suatu tempat destinasi wisata, terutama wisatawan asing. Desa Muara Jambi sendiri juga sering mengadakan event seni budaya untuk menarik wisatawan yang datang ke Candi Muara Jambi.³⁷

4.2 Dampak Pemekaran dibidang Pariwisata

Pasca pemekaran Kabupaten Muaro Jambi menata kembali objek wisata yang ada di Kabupaten Muaro Jambi yang sebelumnya belum banyak diketahui banyak orang. Salah satu wisata yang di obrak habis habis sebagai pemasukan daerah adalah wisata cagar Budaya Candi Muaro Jambi. hasil studi lapangan, kegiatan ekonomi di kawasan Candi Muaro Jambi dibagi dalam dua kategori yaitu kegiatan ekonomi utama pariwisata dan kegiatan ekonomi pendukung pariwisata. Jenis kegiatan ini dikategorikan sebagai kegiatan yang secara langsung berkontribusi kepada sektor pariwisata. Kegiatan ini saling berhubungan satu sama lainnya dan 1 Dosen FKIP Universitas Batanghari memiliki saling ketergantungan. Sementara itu dalam sebuah destinasi biasanya banyak kegiatan ekonomi lain yang terkait dengan kegiatan pariwisata, seperti toko souvenir, penjaja makanan, jasa foto dan sebagainya. Kegiatankegiatan ini dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi pendukung pariwisata. Dengan kata lain kegiatan ini terkait secara tidak langsung dengan kegiatan pariwisata, dimana jika tidak ada

³⁷ Isti'annah Fitriani. 2019. Analisis Nilai Ekonomi Objek Wisata Kawasan Candi Muara Jambi Dalam Perspektif Masyarakat Desa Muara Jambi Sebagai Cagar Budaya Nasional. Skripsi. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam U N I V E R S I T A S I S L A M N E G E R I Sulthan Thaha Saifuddin Jambi J A M B I.

kegiatan ekonomi pendukung, pariwisata tetap bisa berjalan, sepanjang ketiga pilar kegiatan ekonomi utamanya tersedia.³⁸

Kawasan Candi Muaro Jambi merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Kawasan Cagar Budaya Nasional dengan status sebagai situs warisan budaya nasional dan juga masuk dalam daftar tentative World Heritage. Objek yang berupa artefak dan struktur (candi, kolam, menapo, dan sebagainya) di kawasan percandian ini relatif dalam kondisi baik dan terawat. Pengelolaan Candi Muaro Jambi sekarang dilakukan oleh Balai pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi, meskipun dalam status wilayah konservasi, kawasan percandian dianggap rentan terhadap perubahan lingkungan dikarenakan area yang terintegrasi dengan kawasan pemukiman, perkebunan kelapa sawit dan tambang batu bara.³⁹

Pada tahun 2000 Badan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kabupaten Muaro Jambi mempercepat pembangunan akses ke tempat wisata yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Karena itu penghambat wisatawan mendatangi Candi Muaro Jambi ialah aksesibilitas seperti yang telah di deskripsikan, kondisi jalan yang kurang mendukung serta mode transportasi umum yang terbatas. Perbaikan aksesibilitas dibutuhkan demi mendukung pariwisata religi, seperti pelebaran jalan, penyediaan fasilitas kapal tradisional untuk menuju candi juga dapat membantu perbaikan aksesibilitas.

Kebijakan terkait pariwisata untuk Kabupaten Muaro Jambi sendiri, seperti ripparkab dan sejenisnya belum di tetapkan, menurut dinas pariwisata

³⁸ Sri Marmoa. IPTEKS BAGI MASYARAKAT (IbM) KLASER INDUSTRI KECIL MAKANAN KHAS DI CANDI MUARO JAMBI. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.15 No.4 Tahun 2015

³⁹ Booklet Kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi, BPCB Jambi 2016

perumusan kebijakan akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Salah satu penghambat ialah belum adanya zonasi wilayah, dan sekarang sedang dilakukan proses penetapan zonasi. Tetapi sudah ada draft Rencana Induk dan Rencana Detail KSPN Candi Muaro Jambi. Idealnya kebijakan sudah harus ada dan disosialisasikan kepada setiap pemangku kepentingan, mengingat kompleksnya industry pariwisata sehingga tanpa adanya landasan yang jelas, bentuk eksploitasi dan pelanggaran lainnya sangatlah rentan terjadi.⁴⁰

⁴⁰ Wawancara bersama kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten muaro Jambi 8 oktober 2022. Pkl 11.35 wib

BAB V PENUTUP

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Muaro Jambi salah satu kabupaten di provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Batang Hari, secara resmi pemerintahan kabupaten Muaro Jambi mulai dilaksanakan pada tanggal 12 oktober 11999. Pusat pemerintahan di Kota Sengeti sebagai Ibukota di kabupaten Muaro Jambi dengan pusat perkantoran di Bukit Cinto Kenang kecamatan sekernan/ Sengeti. Berdasarkan sumberdaya alam yang dimiliki, Kabupaten Muaro Jambi memiliki komoditi pertambangan seperti minyak bumi, gas bumi, batubara, pasir kuarsa, dan kaolin. Industri yang ada di Kabupaten Muaro Jambi dan Batanghari merupakan industri rumah tangga yang tergolong ke dalam jenis industri skala kecil hingga skala menengah. Tempat pariwisata yang terdapat di Kabupaten Muaro Jambi dan Batanghari terdiri dari situs-situs sejarah dan objek wisata alam. Beberapa tempat wisata yang dikembangkan antara lain Situs Candi Muaro Jambi, Suku Anak Dalam, dan Pariwisata Agro (perkebunan sawit, nanas, duku, jeruk, durian.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Batanghari dan DPRD Kabupaten Batanghari maka diantara ketiga wilayah tersebut didapatkan lah Muara Bulian sebagai Ibukota Batang Hari. Pemilihan Ibukota Batanghari dilakukan dengan penuh pertimbangan, diantaranya Kabupaten Batanghari pada masa era 1979 merupakan wilayah dua Ex Kewedanaan yakni Kewedanaan Muara Tembesi dan Kewedanaan Jambi Luar

Kota. Muara Bulian sendiri merupakan kota Kecamatan yang berada di tengah-tengah Ex Ibukota Kewedanaan Jambi Luar Kota dan Muara Tembesi maka berdasarkan kesepakatan bersama Kabupaten Batanghari lebih cocok dan strategis berada diwilayah Kecamatan Maura Bulian. Kemudian disahkan oleh ketua DPRD Kabupaten Batang Hari Raden Ateng.. Terbentuknya Muaro Jambi tahun1999 memberi dampak terhadap wilayahnya seperti ekonomi, budaya dan Pariwisata.

Adapun dampak besar dari pemekaran muaro Jambi adalah pada bidang politik, sosial dan Budaya. Pemekaran Muaro Jambi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana birokrasi yang ada menjadi lebih pendek dan sederhana, dan semua sumber daya lokal dapat dinikmati dan dikelola langsung bagi dan oleh masyarakatnya, dan pengawasan terhadap masyarakatnya juga menjadi lebih mudah. Namun fakta di lapangan tujuan pemekaran seperti ini sangat jarang ditemukan. Ketidaksiapan pemerintah di dalam pemekaran wilayah, tidak hanya membawa dampak sesaat. Tetapi juga dirasakan oleh masyarakat hingga sekarang. Keputusan tergesa-gesa di awal pemekaran, menyebabkan kebijakan pembangunan di kabupaten baru tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan paparan “**.PEMBENTUKAN KABUPATEN MUARO JAMBI 1997-2000** Kajian Historiografi ini diharapkan dapat menambah koleksi Sejarah Kabupaten Muaro Jambi Kepada

- a. Pemerintahan : Agar lebih memajukan dan memperhatikan Sejarah di Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi umumny Jambi yang belum banyak

tersentuh. Kemudian mendukung para penulis Sejarah yang akan mengkaji wilayah Muaro Jambi

b. Kepada Masyarakat: Diharapkan ikut serta dalam membantu pelestarian nilai Sejarah di Muaro Jambi , menjaga peninggalan sejarah sebagai identitas diri. Kemudian mendukung program pemerintah dalam melestarikan Sejarah dan Budaya di Muaro Jambi

Demikianlah penelitian ini, sebagai penulis kami menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Masih ada celah dan merupakan kesempatan bagi penulis lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan penelitian yang penulis lakukan

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim, *Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2022
- Booklet Kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi, BPCB Jambi 2016
- BPS Kabupaten Batang Hari 1999 (Yang disempuernakan Untuk Muaro Jambi)
- BPS Kabupaten batang Hari 1999
- BPS Kabupaten Batang Hari 2000
- Elza. 2021. Skripsi. Sejarah Pelabuhan Dagang Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung 1965-1995. Program Studi Ilmu Sejarah Jurusan Sejarah, Seni Dan Arkeologi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi
- Daliman. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2015
- Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2007
- Helius Syamsudin, *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak. 2007
- Isti'anah Fitriani. 2019. Analisis Nilai Ekonomi Objek Wisata Kawasan Candi Muara Jambi Dalam Perspektif Masyarakat Desa Muara Jambi Sebagai Cagar Budaya Nasional. Skripsi. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam U N I V E R S I T A S I S L A M N E G E R I Sulthan Thaha Saifuddin Jambi J A M B I.
- Kuntowijoyo, "*Pengantar Ilmu Sejarah*". Yogyakarta: Betung Budaya. 1995
- Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial Perubahan Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2014
- Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional Indonesia*. Jiid VI. Jakatra: Balai Pustaka 1997
- Sartono Kartodirdjo. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2016
- Ria Rizki. 2022. Skripsi. *Eksistensi Muara Bulian Sebagai Ibukota Batanghari 1979 1999*. Program Studi Sejarah Jurusan Sejarah, Seni dan Arkeologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi
- Sri Marmoa. *Ipteks Bagi Masyarakat (Ibm) Klaster Industri Kecil Makanan Khas Di Candi Muaro Jambi*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.15 No.4 Tahun 2015
- Syaifudin Jurdi, *Awal Mula Susiologi Modren: Kerangka Epistemologi, Metodologi, dan Perubahan Sosial Perspektif Ibn Khaldun* Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2012
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- Yayan Amroni. Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2010-2016. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Yuliati, Emie. 2011. "Evaluasi Hasil Pemekaran: Studi Kasus Pemekaran Kabupaten". Tesis Tidak Dipublikasikan. Jakarta: Program Megister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia

Wawancara: Mochtar Hadi perangkat desa dan Sejarahwan Desa Muara Jambi tentang sejarah Candi Muara Jambi, tanggal 9 Oktober 2022, jam 14.30 WIB.

Wawancara: Abdul Havis sebagai perangkat desa dan Sejarahwan Desa Muara Jambi tentang kawasan Candi Muara Jambi, tanggal 11 oktober 2022, jam 14.30 WIB

Wawancara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi. 3 Oktober 2022 pkl 09.34

Wawancara bersama kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olaraga Kabupaten muaro Jambi 8 oktober 2022. Pkl 11.35 wib

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1999

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2000
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 54 TAHUN
1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN,
KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR

LAMPIRAN



Gambar. 1 Penelitian BPS Kabupaten Muaro Jambi



Gambar 2. Penelitian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Muaro Jambi



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**

Jl. Lintas Timur - Sengeti Komplek Perkantoran Ankso Dano
e-mail : dpad.muarojambi@gmail.com Telp. 0741-3051862

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 070 / /DPAD/X/2022

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi Nomor : 3835/UN21.3/PT.01.04/2022 hal Permohonan izin penelitian tanggal 22 Agustus 2022, maka kami selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Muaro Jambi menyambut dengan baik dan memberikan izin untuk kegiatan penelitian tersebut kepada :

Nama : Anugrah T.M. Siahaan
NIM : 11A117034
Program Studi : Ilmu Sejarah
Jurusan : Sejarah, Seni, dan Arkeologi
Dosen Pembimbing Skripsi : 1. Dr. Supian, S.Ag., M.Ag
2. Abd.Rahman, S.Pd, M.A

Mahasiswa tersebut memang benar melakukan kegiatan penelitian dari tanggal 10 Oktober 2022 s.d 10 November 2022, dengan judul penelitian :

“ Pembentukan Kabupaten Muaro Jambi 1997-2000 ”.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI



M. FAUZI DARWAS, S.Si, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197401141997121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi – Ma. Bulian, KM. 15, Mendalo Indah, Jambi
Kode Pos. 36361, Telp. (0741)583453 Laman. www.fkip.unja.ac.id Email. fkip@unja.ac.id

Nomor : 4523/UN21.3/KM.05.01/2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian.

4 September 2022

Yth. Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Muaro Jambi
Jl. Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang
Bukit Baling Kec. Sekernan

Sengeti

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Saudara, bahwa mahasiswa FKIP Universitas Jambi atas nama :

Nama : Anugrah T.M. Siahaan
NIM : IIA117034
Program Studi : Ilmu Sejarah
Jurusan : Sejarah, Seni dan Arkeologi
Pembimbing Skripsi : 1. Dr. Supian, S.Ag., M.Ag.
2. Abd. Rahman, S.Pd., M.A.

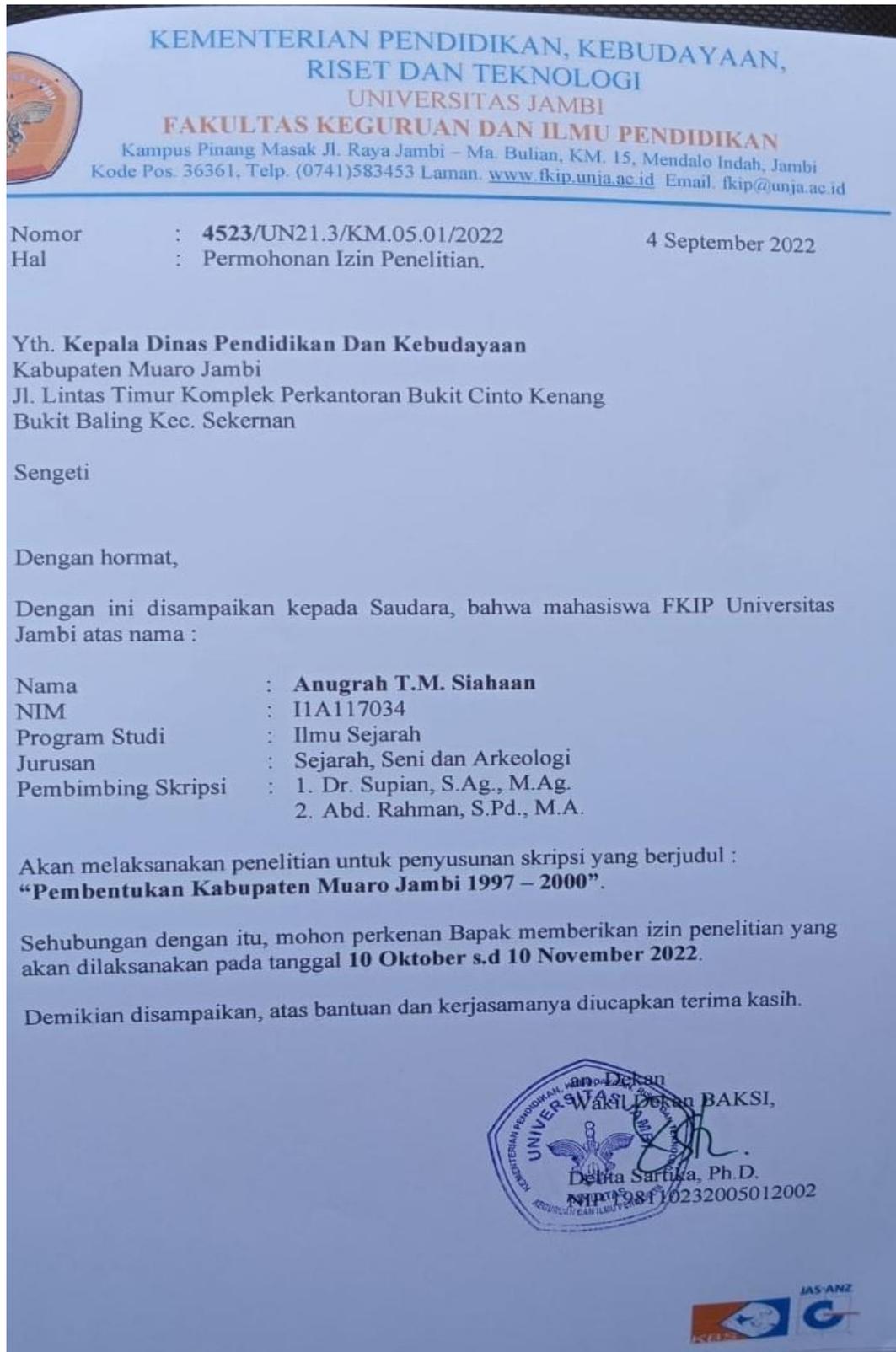
Akan melaksanakan penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul :
“Pembentukan Kabupaten Muaro Jambi 1997 – 2000”.

Sehubungan dengan itu, mohon perkenan Bapak memberikan izin penelitian yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober s.d 10 November 2022.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Gambr 4. Surat Izin Penelitian



Gambr 6. Surat Izin Penelitian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN,
KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Jambi pada umumnya serta Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Batang Hari, dan Kabupaten Tanjung Jabung pada khususnya, adanya aspirasi yang berkembang dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Batang Hari, dan Kabupaten Tanjung Jabung, dipandang perlu membentuk Kabupaten Sarolangun sebagai pemekaran dari Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Tebo sebagai pemekaran dari Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi sebagai pemekaran dari Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai pemekaran dari Kabupaten Tanjung Jabung;
 - c. bahwa pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;
 - d. bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c serta berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus ditetapkan dengan undang-undang;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Kabupaten Batang Hari adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Propinsi Sumatera Tengah;
- c. Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tanjung Jabung adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah;
- d. Propinsi Jambi adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai undang-undang;

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA
Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam wilayah Propinsi Jambi.

Pasal 3

Kabupaten Sarolangun berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko yang terdiri atas wilayah:

- a. Kecamatan Sarolangun;
- b. Kecamatan Pelawan Singkut;
- c. Kecamatan Limun;
- d. Kecamatan Batang Asai;
- e. Kecamatan Pauh; dan
- f. Kecamatan Mandiangin.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Kabupaten Tebo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bungo Tebo yang terdiri atas wilayah:

- a. Kecamatan Tebo Ilir;
- b. Kecamatan Tebo Tengah;
- c. Kecamatan Tebo Ulu; dan
- d. Kecamatan Rimbo Bujang.

Pasal 5

Kabupaten Muaro Jambi berasal dari sebagian Kabupaten Batang Hari yang terdiri atas wilayah :

- a. Kecamatan Jambi Luar Kota;
- b. Kecamatan Sakernan;
- c. Kecamatan Kumpeh Ulu;
- d. Kecamatan Maro Sebo;
- e. Kecamatan Kumpeh; dan
- f. Kecamatan Mestong.

Pasal 6

Kabupaten Tanjung Jabung Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Tanjung Jabung yang terdiri atas wilayah:

- a. Kecamatan Muaro Saba;
- b. Kecamatan Dendang;
- c. Kecamatan Mendahara;
- d. Kecamatan Rantau Rasau;
- e. Kecamatan Nipah Panjang; dan
- f. Kecamatan Sadu;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN,
KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

I. UMUM

Propinsi Jambi pada umumnya serta Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Batang Hari, dan Kabupaten Tanjung Jabung pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi Daerah, luas wilayah, dan kebutuhan pada masa mendatang.

Propinsi Jambi mempunyai luas wilayah 53.435,72 km² dengan sarana dan prasarana komunikasi serta transportasi yang relatif masih terbatas, khususnya di wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko bagian timur, Kabupaten Bungo Tebo bagian timur, Kabupaten Batang Hari bagian timur, dan Kabupaten Tanjung Jabung bagian timur.

Kabupaten Sarolangun Bangko sebelum dimekarkan mempunyai luas wilayah 13.863 km². Dalam rangka membantu tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di bagian timur dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Sarolangun Bangko Wilayah Timur yang meliputi enam kecamatan, yaitu Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Pelawan Singkat, Kecamatan Limun, Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Mandiangin dengan luas wilayah keseluruhan 6.184 km².

Kabupaten Bungo Tebo mempunyai luas wilayah 11.120 km². Dalam rangka membantu tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di bagian timur, dibentuk wilayah kerja Pembantu Bupati Bungo Tebo Wilayah Timur yang meliputi empat kecamatan, yaitu Kecamatan Tebo Ilir, Kecamatan Tebo Tengah, Kecamatan Tebo Ulu, dan Kecamatan Rimbo Bujang dengan luas wilayah 6.461 km².

Kabupaten Batang Hari mempunyai luas wilayah 11.130 km². Dalam rangka membantu tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, di bagian timur, dibentuk wilayah kerja pembantu Bupati Batang Hari Wilayah Timur yang meliputi enam kecamatan yaitu Kecamatan Jambi Luar Kota, Kecamatan Sakernan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kecamatan Maro Sebo, Kecamatan Kumpeh, Kecamatan Mestong dengan luas wilayah keseluruhan 5.326 km².

Kabupaten Tanjung Jabung mempunyai luas wilayah 10.094,85 km². Tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Tanjung Jabung bagian timur dilakukan oleh enam kecamatan, yaitu Kecamatan Muaro Sabak, Kecamatan Dendang, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang, dan Kecamatan Sadu dengan luas wilayah keseluruhan 5.445 km².